

BAB I

PENDAHULUAN

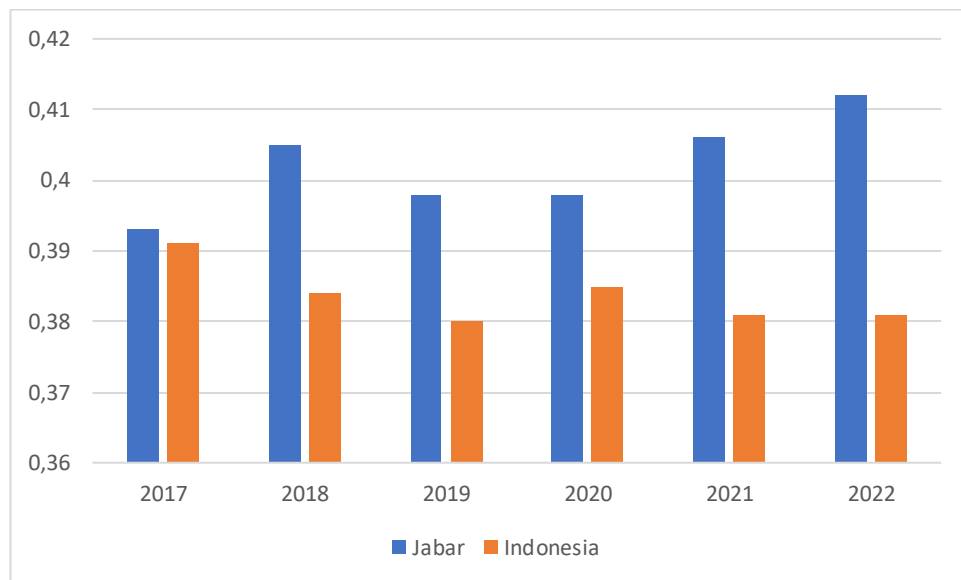
1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pembangunan adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (Tambunan, 2001). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan yang absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Kuncoro,2010).

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi. Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Selain itu ketimpangan wilayah disebabkan juga karena adanya perbedaan demografi yang cukup besar antar wilayah. Kondisi demografi yang dimaksud meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografi berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat, sehingga

dapat meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Syafriзал, 2012: 120). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol hingga satu.

Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya cenderung meningkat bahkan jika dibandingkan dengan Indonesia. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di Indonesia dengan memiliki sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menghasilkan pendapatan lebih tinggi, seperti manufaktur, teknologi, dan jasa finansial. Namun, hal ini hanya dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan.



Sumber BPS Jawa Barat 2023

Gambar 1. 1

Perbandingan Gini Rasio Provinsi Jawa Barat dengan Indonesia

Tahun 2017-2022

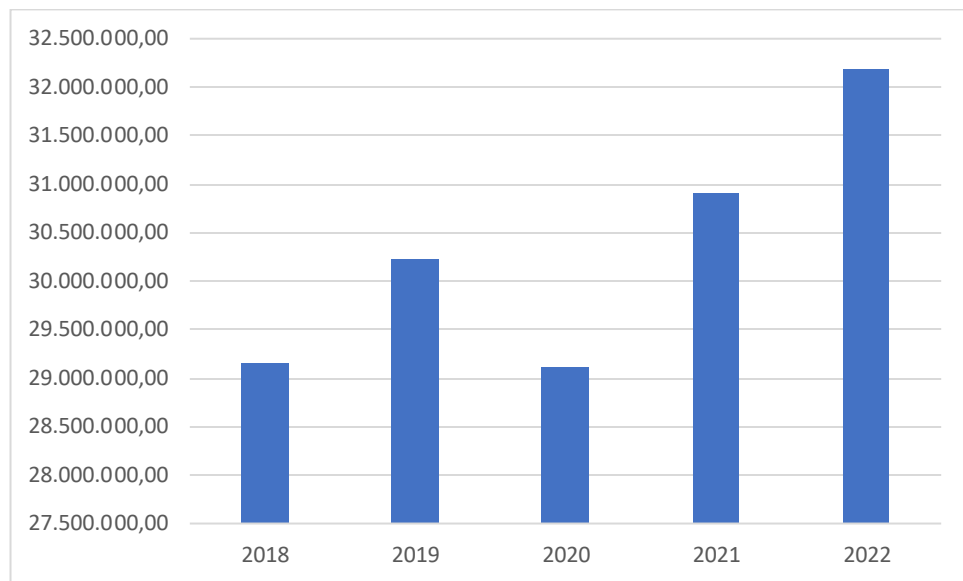
Berdasarkan gambar 1.1 diatas bahwa indeks gini rasio Provinsi Jawa Barat tahun 2017 sebesar 0,393 hingga pada tahun 2021 naik menjadi 0,406 kemudian pada tahun 2022 kembali naik menjadi 0,412. Sedangkan indeks gini rasio di Indonesia setiap tahunnya mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 indeks gini di Indonesia meningkat menjadi 0,385 namun pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan menjadi 0,381. Potensi ekonomi Provinsi Jawa Barat yang begitu besar seharusnya menjadi penggerak utama untuk menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu masalah ketimpangan di Provinsi Jawa Barat menjadi sesuatu yang serius dan harus segera dicari solusinya baik secara nasional maupun daerah.

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga -lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2003). Pertumbuhan ekonomi yang cepat pada suatu negara belum tentu pembangunan ekonominya mengalami keberhasilan, justru pertumbuhan ekonomi memberikan dampak terhadap ketimpangan pendapatan karena tidak seperti pertumbuhan ekonomi selalu diikuti dengan pemerataan Arif & Wicaksani, 2017).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) riil. (Aprilia,dkk 2022)

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2001), Sedangkan PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001).

Gambar 1.2 dibawah menunjukkan bahwa PDRB per kapita di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 sebesar Rp29.160.057 juta. kemudian tahun 2019 naik menjadi Rp30.232.341 juta. lalu tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp29.104.951 juta. Dan pada tahun 2021-2022 PDRB per kapita kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp30.907.588 juta. dan Rp32.182.146 juta.



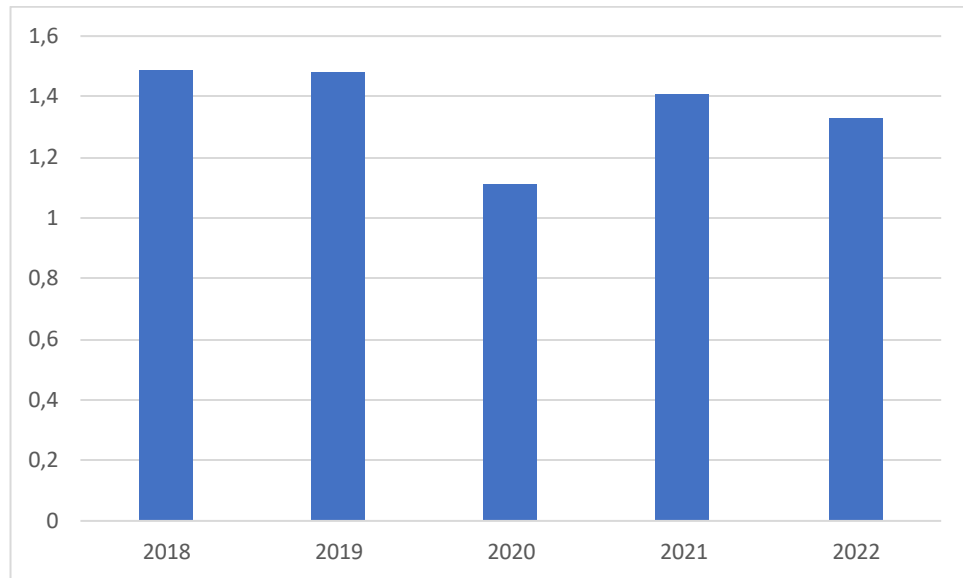
Sumber BPS Jawa Barat 2023

**Gambar 1.2 PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022 (Rupiah)**

Ketimpangan pendapatan yang terjadi dapat disebabkan juga oleh pertumbuhan penduduk. Menurut Lincoln (2010) dalam Anggina (2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah lain seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi dan lain sebagainya. Lincoln juga menambahkan bahwa masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun antar daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor.

Menurut Todaro dalam Anggina (2017), kesenjangan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk

yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang, dan investasi.



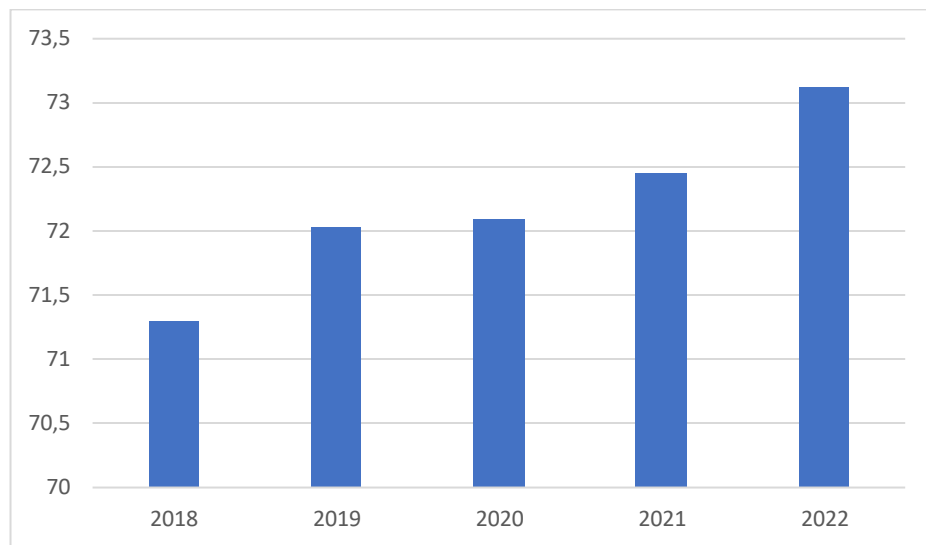
Sumber BPS Jawa Barat 2023

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 1,49 persen. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 pertumbuhan penduduk mengalami penurunan yaitu sebesar 1,48 persen dan 1,11 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan dan penurunan yaitu sebesar 1,41 persen dan 1,33 persen.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan semakin tinggi. (Aprilia,dkk 2022)

Permasalahan yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan IPM salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar daerah/wilayah (Aprilia,dkk 2022). IPM di Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam kategori sedang, namun pada kenyataannya ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya cenderung meningkat. Hal ini berarti IPM di Jawa Barat belum merata, terdapat perbedaan kualitas sumber daya manusia yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. (BPS Jabar 2022).



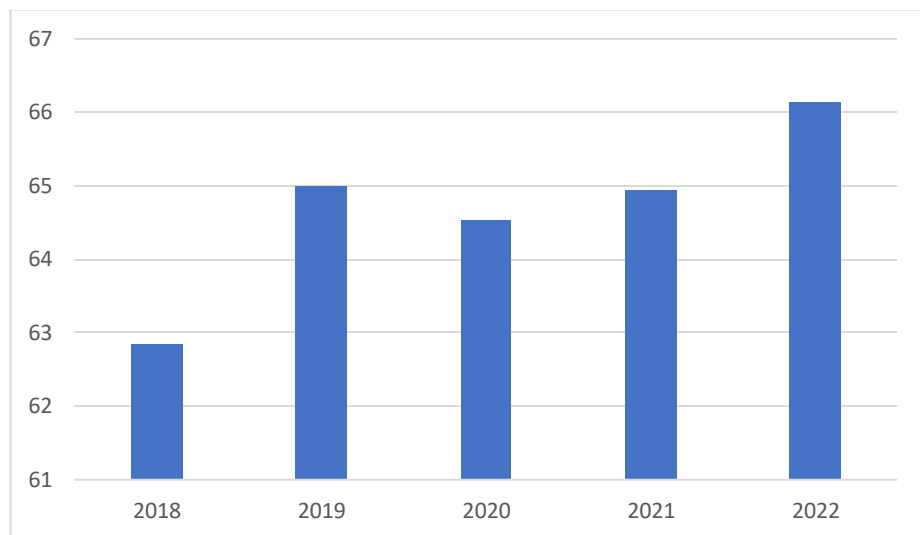
Sumber BPS Jawa Barat 2023

**Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Persen)**

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2018 IPM di Provinsi Jawa Barat sebesar 71,30 persen, kemudian tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 72,03 persen dan 72,09 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 72,45 persen dan 73,12 persen.

Sementara itu, tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dapat menjadi faktor yang bisa mempengaruhi ketimpangan pendapatan (Devita & Farida, 2022). Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi di pulau jawa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 49,40 juta jiwa (Katadata, 2022). Kenaikan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya memberikan dampak positif dan juga negatif bagi perekonomian. Dampak positifnya adalah

Bertambahnya jumlah penduduk dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dan memungkinkan untuk menambah kapasitas produksi. Dengan kondisi demikian pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Namun sebaliknya, kenaikan jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan adanya kenaikan kesempatan kerja akan menjadi bumerang karena ada kemungkinan meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan sehingga berakibat pada ketimpangan pendapatan (Aprilia dkk, 2022).



Sumber BPS Jawa Barat 2023

**Gambar 1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Persen)**

Berdasarkan gambar 1.5 diatas bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 TPAK Provinsi Jawa Barat sebesar 62,84 persen. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 TPAK mengalami kenaikan dan penurunan yaitu sebesar 64,99 persen dan 64,53 persen. Selanjutnya pada tahun

2021 dan 2022 TPAK kembali mengalami kenaikan dan juga penurunan yaitu sebesar 64,95 persen dan 66,15 persen. Penurunan tersebut memiliki arti bahwa jumlah angkatan kerja yang aktif dalam perekonomian atau produktif mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada beberapa alasan yang mendasari penelitian ini. Pertama, masalah ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat yang lebih cenderung naik di setiap tahunnya bahkan selalu melebihi ketimpangan pendapatan nasional. Kedua, variabel PDRB per kapita, laju pertumbuhan penduduk, indeks Pembangunan manusia (IPM), dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dan ketiga, apabila keempat variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan pengaruh untuk menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, maka dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Dari permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul **“ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2002-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita, laju pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2022?
2. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita, laju pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah, maka penulis memiliki tujuan yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita, laju pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita, laju pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2022.

1.3 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini semoga dapat berguna bagi semua pihak, Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini bermaksud untuk menambah wawasan serta memberi manfaat dengan pihak terkait tertentu untuk pengkajian lanjutan mengenai pengaruh PDRB per kapita, laju pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2022

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan pertimbangan dan suatu penentu pengambil kebijakan dan masukan pula kepada pemerintah terkhususnya bagi pemerintahan melakukan kebijakan yang mengarah dan pemecahan permasalahan ketimpangan pendapatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan serta pengetahuan, mengenai analisis pengaruh PDRB per kapita, laju pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2002-2022. Penelitian ini juga digunakan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

